

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling memperkenalkan teori keagenan yang merupakan landasan teoritis yang melandasi praktik bisnis perusahaan yang umumnya digunakan saat ini. Teori ini berasal dari hubungan kontrak antara *principal* atau pemilik dengan manajemen atau manajer. Dalam penelitian tentang teori keagenan pada manajemen keuangan, ditemukan bahwa hubungan keagenan atau *agency relationship* timbul ketika seseorang atau beberapa individu lainnya (agen atau karyawan) memberi wewenang kepada agen atau karyawan untuk bertindak atas nama mereka dan membuat keputusan (Annisa, 2023). Teori keagenan adalah situasi di mana satu entitas (*principal*) memberikan otoritas dan tanggung jawab kepada entitas lain (*agent*) untuk membuat keputusan sesuai dengan kepentingan entitas.

Akuntabilitas publik adalah tanggung jawab pihak yang ditunjuk (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas yang mereka lakukan kepada pihak yang memberi amanah (prinsipal), yang memiliki hak untuk menuntut penjelasan tersebut. Dalam praktiknya, teori keagenan menggambarkan adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Untuk mengurangi konflik tersebut, solusinya adalah dengan melibatkan pihak ketiga seperti auditor (Artana, 2016). Teori keagenan

mengkaji hubungan antara agen dan prinsipal, yang relevan dalam konteks pemerintahan di mana pemerintah bertindak sebagai agen dengan tanggung jawab menyajikan informasi kepada masyarakat sebagai prinsipal guna mencapai akuntabilitas. Dalam teori keagenan, perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal merupakan permasalahan yang dihadapi dalam praktek. Pada konteks pemerintahan, upaya untuk mengurangi konflik kepentingan, laporan keuangan menjadi salah satu alat yang efektif untuk meminimalkan potensi ketegangan antara pemerintah dan masyarakat luas.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu proses pengumpulan maupun pengolahan data dan informasi yang bermanfaat bagi yang memiliki kepentingan. Laporan keuangan menurut pemerintah atau sektor publik merupakan gabungan berbagai macam organisasi seperti pemerintahan, badan usaha milik negara dan masyarakat. Tujuannya memberikan transparansi terkait dengan pendapatan yang diterima maupun pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah atau entitas sektor publik dalam rangka memenuhi tujuan dan spesifik masyarakat. Sedangkan laporan keuangan swasta adalah dokumen yang memberikan gambaran tentang kondisi keuangan, hasil operasional, dan aliran kas entitas bisnis atau organisasi yang dimiliki oleh pihak swasta. Tujuannya yaitu memberikan informasi kepada pemilik, investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan mengenai kinerja finansial dan kemampuan entitas swasta dalam menciptakan keuntungan.

2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah seberapa baik laporan tersebut menggambarkan posisi keuangan dan hasil operasi suatu entitas. Laporan keuangan merupakan dokumentasi mengenai informasi finansial suatu perusahaan atau entitas pemerintah selama periode akuntansi tertentu yang memberikan gambaran tentang performa dan kondisi keuangan dari perusahaan atau entitas tersebut. Kualitas adalah ciri yang membuat informasi pada laporan keuangan berguna bagi yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan menjadi sebuah karakteristik yang harus terpenuhi agar informasi yang terdapat di dalamnya menjadi bermanfaat bagi para penggunanya. Nur dan Noviany mengungkapkan (dalam Rafid, 2016) bahwa variabel kualitas laporan keuangan daerah dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Riwayat aktivitas keuangan sebelumnya
2. Memprediksi masa yang akan datang
3. Ketepatan waktu dalam penyajian
4. Proses pengambilan keputusan
5. Disajikan dengan wajar dan jujur
6. Informasi dapat dibandingkan
7. Informasi dalam laporan keuangan mudah dipahami
8. Sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

2.4 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Standar akuntansi pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditentukan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP sebagai pedoman diharapkan mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat pada laporan keuangan harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan informasi yang disediakan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan pemerintah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh sebab itu, orang yang bertugas menyajikan laporan keuangan di suatu instansi pemerintah haruslah paham mengenai aturan maupun standar pelaporan keuangan yang berlaku sehingga menjadikan laporan keuangan tersebut berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Dengan kata lain, unsur pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah berperan penting dalam pengelolaan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Rafid, 2016). Variabel

pemahaman standar akuntansi pemerintah diukur dari indikator sebagai berikut:

1. Memahami tentang neraca
2. Memahami tentang laporan realisasi anggaran
3. Memahami tentang laporan arus kas
4. Memahami tentang catatan atas laporan keuangan
5. Memahami tentang persediaan
6. Memahami tentang investasi
7. Memahami tentang asset tetap
8. Memahami tentang kontruksi dalam pekerjaan
9. Memahami tentang kewajiban
10. Memahami tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa.

2.5 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang melakukan pemrosesan data dan transaksi dengan tujuan menghasilkan informasi yang berguna untuk perencanaan, pengendalian, dan operasional bisnis. Menurut Laudon Sistem informasi berisi kumpulan komponen terhubung yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam suatu organisasi (dalam Rohmah et al., 2020). Sistem akuntansi pemerintahan merujuk pada serangkaian prosedur yang terorganisir dengan baik, peralatan, dan komponen lainnya yang digunakan untuk melaksanakan

fungsi akuntansi, menganalisis transaksi, dan menyusun laporan keuangan dalam lingkungan pemerintahan daerah. Semakin baik sistem informasi akuntansi maka semakin baik pula kualitas laporannya. Menurut Wilkinson (dalam Rafid, 2016) variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi diukur dari indikator sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi yang sesuai SAP
2. Jaringan internet
3. Pemanfaatan optimal jaringan internet
4. Perangkat lunak yang dipergunakan
5. Laporan keuangan yang menggunakan teknologi komputer
6. Perangkat lunak yang sesuai dengan regulasi hukum

2.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan elemen penting yang perlu diperhatikan di dalam sebuah instansi. Untuk meningkatkan kualitas SDM, diperlukan upaya pembinaan. Pembinaan sumber daya manusia bertujuan untuk memperoleh tenaga kerja yang memiliki tingkat disiplin, profesionalisme, kualitas tinggi, dan produktivitas guna mencapai hasil kerja yang efektif dan efisien (Adhitama, 2017). Menurut (Syafira, 2022) kompetensi merujuk pada atribut atau karakteristik seseorang yang menyebabkannya berhasil dalam pekerjaannya. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten yang berarti cakap, mampu, terampil. Kompetensi mengacu kepada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam

pekerjaannya. Jadi kompetensi merupakan performan yang mengarah pada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang diinginkan.

Dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya agar dapat mencapai tingkatan pegawai yang profesional (Syafira, 2022). Variabel kompetensi sumber daya manusia dapat diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Xu et al (dalam Rafid, 2016) sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai akuntansi
2. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas
3. Sumber daya yang mencukupi
4. Tanggung jawab dan peranan
5. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerjaan
6. Sosialisasi peraturan terbaru

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Identitas Peneliti	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Artana, 2016) Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap	Studi Pada Pemerintah DKI Jakarta.	Metode analisis data kuantitatif.	Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, pemahaman standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatana sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak terdapat

	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.			pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
2	(Rafid, 2016) Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Bone).	Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Bone.	Metode analisis data kuantitatif.	Pemahaman SAP dan Pemanfaatan SIA berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, Kompetensi SDM memoderasi hubungan antara pengaruh pemahaman SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan kompetensi SDM memoderasi hubungan antara pengaruh pemanfaatan SIA terhadap kualitas laporan keuangan.
3	(Lestari & Dewi, 2020) Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab Bandung.	Metode analisis data kuantitatif.	Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan.
4	(Sihasale et al., 2018) Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan	Studi Empiris Pada SKPD BPKAD Kabupaten Malang.	Metode analisis data kuantitatif.	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman SAP dan pemanfaatan SIA berpengaruh terhadap kualitas laporan

	dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi SDM Sebagai Variabel Moderasi.			keuangan pemerintah daerah, dan kompetensi sumber daya manusia mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh pemahaman SAP dan pemanfaatan SIA terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5	(Siregar, 2021) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Labuhanbatu.	Metode analisis data kuantitatif.	Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan variabel sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi variabel yang berpengaruh dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi.

Sumber : Dibuat oleh Peneliti, 2024

2.8 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah dengan Kualitas

Laporan Keuangan Balai PSDA Pemali Comal

Implementasi standar akuntansi pemerintah memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut Adhi dan Suhardjo (dalam Artana, 2016) standar akuntansi pemerintah berfungsi sebagai pedoman yang menjamin agar laporan keuangan dipersiapkan dengan memenuhi persyaratan informasi keuangan. Menurut Bastian (dalam Arza et al., 2021) terdapat hubungan antara standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah, sehingga SAP mempunyai persyaratan yang mengikat secara hukum untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia.

Dengan pemahaman terhadap standar akuntansi yang dimiliki oleh pegawai pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu penting bagi setiap aparatur pemerintah untuk bisa memahami standar akuntansi pemerintah sehingga dapat menerapkan standar pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rohmah et al., 2020); (Adhitama, 2017) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan. Hasil yang sama juga ditemukan oleh (Lestari & Dewi, 2020) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Tetapi hasil yang berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pavitasari & Aisyah, 2019) yang menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin baik pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H1: Pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

2.8.2 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dengan Kualitas Laporan Keuangan Balai PSDA Pemali Comal

Teknologi informasi adalah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk kepada segala bentuk teknologi yang membantu manusia dalam proses pembuatan, perubahan, penyimpanan, komunikasi, dan penyebaran informasi. Ini melibatkan penggabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirim informasi.

Pada penyusunan laporan keuangan diperlukan pemanfaatan sistem informasi akuntansi untuk dapat memproses data dengan cepat dan akurat sehingga informasi keuangan dapat disajikan tepat waktu. Dengan pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang digunakan dapat membantu proses penyusunan laporan keuangan yang akan dihasilkan.

Pemanfaatan teknologi informasi dengan benar dapat mendukung penciptaan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Penelitian yang dilakukan (Sihasale et al., 2018); (Rohmah et al., 2020) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut dikarenakan pemanfaatan sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi tentang laporan keuangan dan menjamin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Hasil yang sama juga dilakukan oleh (Wahyuni, 2021) pada penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil berbeda yang ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh (M. M. Nur et al., 2023) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika pemanfaatan terhadap sistem informasi dilakukan maka proses pembuatan laporan keuangan akan tepat waktu. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H2: Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

2.8.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Balai PSDA Pemali Comal

Selain pentingnya pemahaman terhadap sistem akuntansi pemerintah, sumber daya manusia juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Pada dasarnya sumber daya manusia merupakan sebuah individu produktif yang dipekerjakan oleh organisasi maupun lembaga sebagai pelaku, pemikir, dan perencana yang dilatih dan dikembangkan ketrampilannya untuk mencapai tujuan dari organisasi atau lembaga.

Dengan pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sebagai staf penyusun laporan keuangan akan menjadikan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Kompetensi dapat memperkuat pegawai dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan, karena standar akuntansi pemerintah berfungsi sebagai panduan untuk menyusun serta menyajikan laporan keuangan pemerintah. Kompetensi sumber daya manusia dibutuhkan untuk menunjang proses pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Rafid, 2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Artana, 2016); (Pavitasari & Aisyah, 2019) yang juga menyatakan bahwa

kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Namun hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ariyani, 2018) dan (Siregar, 2021) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang konsisten memiliki pengaruh yang signifikan pada kualitas laporan keuangan. Semakin kompeten sumber daya manusia yang menyusun laporan keuangan, maka semakin baik pula laporan keuangan yang akan dihasilkan. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H3: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

2.8.4 Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Balai PSDA Pemali Comal

Dalam pengelolaan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas telah menjadi fokus penting bagi masyarakat sehingga pemerintah harus membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pada teori keagenan, pemerintah sebagai agen memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas yang

mereka lakukan kepada pihak yang memberi amanah (prinsipal). Hal ini dilakukan sebagai upaya menciptakan laporan keuangan yang berkualitas.

Memahami standar akuntansi pemerintahan berarti memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan proses akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dengan mengikuti prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang berlaku. Selain pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan terhadap sistem informasi akuntansi juga dapat menghasilkan laporan keuangan tepat waktu. Dalam implementasi sistem informasi akuntansi yang menggunakan teknologi dan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi, diperlukan partisipasi sumber daya manusia untuk mengelola dan menjalankan sistem tersebut. Meskipun pegawai tidak memiliki latar belakang akuntansi, mereka diharapkan memahami pengelolaan keuangan melalui sistem yang telah dirancang. Dengan pemahaman standar akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia yang dilakukan bersamaan dapat menghasilkan laporan yang berkualitas.

Penelitian yang dilakukan oleh (R. A. Nur, 2019); (Rohmah et al., 2020); (Arza et al., 2021) menyatakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa untuk menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik dibutuhkan sumber daya manusia

yang berkualitas serta menerapkan standar akuntansi pemerintah dan memanfaatkan sistem informasi agar penyusunan laporan keuangan mengurangi kesalahan dalam perhitungan dan menghemat waktu dalam proses penyusunannya.

H4: Pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan